BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai macam program untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kendati demikian majunya kesejahteraan umum di Indonesia agaknya masih perlu menunggu. Pasalnya Indonesia memiliki sebuah pekerjaan rumah yang masih belum selesai dari masa ke masa, yaitu kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi penyakit lama, tepatnya diawal kemerdekaan. Setelah mewarisi kemiskinan di masa kolonial, Indonesia masih harus membangun negaranya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berbagai macam sistem perekonomian pernah diterapkan dalam rangka mewujudkan majunya kesejahteraan umum. Hingga pada zaman pemerintahaan presiden Soeharto, Indonesia pernah dinobatkan sebagai salah satu "Macan Asia" di dalam laporan *World Bank* yang berjudul *The East Asian Miracle* (1993). Sayangnya pada akhir tahun 1997 Indonesia malah mengalami krisis moneter yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin parah (Purwantoro, 2007). Hingga kini pemerintah terus berupaya untuk memberantas kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Indonesia adalah negara kepulauan yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki luas wilayah 1.916.862,2 km^2 yang terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan. Apabila dibandingkan negara lain seperti Jepang, maka hanya dengan Pulau Sumatra saja luasnya sudah melebihi negara tersebut. Tentu dengan negara yang teramat luas ini Indonesia juga memiliki penduduk yang amat banyak yaitu mencapai 261,9 juta jiwa pada tahun 2017 (negara dengan penduduk negara terbanyak ke-4 di dunia). Hal ini jelas memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia mengurusi seluruh warganya. Terutama dalam mengetaskan kemiskinan.

Salah satu pulau besar di Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau ini cukup spesial karena menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di negara ini. Akses di pulau ini bisa dibilang lebih maju dibanding dengan daerah atau pulau-pulau lain. Akan tetapi masalah kemiskinan juga belum selesai di pulau ini. Meskipun setiap tahun secara persentase kemiskinan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.1

Tingkat Penduduk Miskin di Pulau Jawa (persen)

Provinsi di Pulau Jawa	2014	2015	2016	2017	2018
DKI JAKARTA	4.005	3.77	3.75	3.775	3.56
JAWA BARAT	9.31	9.55	8.86	8.27	7.35
JAWA TENGAH	14.02	13.45	13.23	12.62	11.255
DI YOGYAKARTA	14.775	14.035	13.22	12.69	11.97
JAWA TIMUR	12.35	12.31	11.95	11.485	10.915
BANTEN	5.43	5.825	5.39	5.52	5.245

Sumber : BPS Indonesia 2019

Dari data tersebut daerah yang memiliki persentase kemiskinan paling tinggi dari 5 tahun terakhir di Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini cukup menarik mengingat Provinsi DIY pernah menjadi Ibu Kota Darurat Negara Indonesia pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II. Selain itu Provinsi DIY juga menjadi salah satu lokasi primadona destinasi berwisata dikarenakan keindahan dan keberagaman pariwisatanya.

Jumlah wisatawan yang bertandang ke DIY dari tahun ke tahun baik lokal maupun asing terus mengalami kenaikan. Bahkan jumlah wisatawan dari tahun 2011 sampai tahun 2017 naik hampir 3 kali lipat dari 9.300.624 jiwa menjadi 25.950.793 jiwa (Dinas Pariwisata DIY, 2018). Banyaknya wisatawan yang berkunjung seharusnya bisa menjadi stimulus penduduknya membuka berbagai usaha karena banyaknya wisatawan yang masuk serta menyerap lapangan pekerjaan untuk mengurusi tempat wisata dan akses penunjangnya.

Menurut BPS dalam 5 tahun terakhir (2014 sampai 2018) Provinsi DIY menduduki peringkat kedua dalam Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa bahkan di Indonesia. Sumber daya manusia yang baik seharusnya bisa menjadi amunisi dalam menorong produktivitas kerja sehingga dapat membantu dalam mengurangi kemiskinan (Suliswanto, 2010). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Supraba (2018) yang meneliti tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dengan salah satu variabelnya adalah IPM dan menghasilkan IPM secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Banyaknya jumlah wisatawan dan sumber daya manusia yang baik harusnya dapat menjadi modal dalam memperoleh pekerjaan. Banyaknya orang yang bekerja akan mengurangi pengangguran sehingga berdampak turunnya kemiskinan karena pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan (Puspita, 2015). Akan tetapi kenyataannya Provinsi DIY malah menjadi paling terpuruk dalam masalah kemiskinan dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Melihat semua kelebihan dan penelitian yang sudah ada menjadi tanda tanya mengapa Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Untuk itu penulis bermaksud membuat penelitian tentang "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Wisatawan Terhadap Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, IPM dan wisatawan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh wisatawan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto per kapita, IPM dan wisatawan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

   Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengkritisi dan menganalisis masalah secara lebih ilmiah dengan data-data dan teori yang ada. Penulis juga berharap dengan selesainya penelitian ini dapat memenuhi prasyarat mendapatkan gelar S1-nya dibidang Fakultas Ekonomi.
2. Bagi Pembaca

   Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah

   Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Di dalamnya berisikan gambaran umum tentang penelitian yang berisi tinjauan umum mengenai kemiskinan di Indonesia lalu di kerucutkan mengenai kemiskinan di Provinsi DIY dengan gambaran variabel-variabel yang diduga mampengaruhi kemiskinan di Provinsi DIY.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisikan tentang pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan variabel atau metode yang sama dengan variabel atau metode yang digunakan untuk penelitian ini. Adapun landasan teori berisi tentang, teori kemiskinan, teori Produk Domestik Regional Bruto per kapita, teori IPM dan teori wisatawan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan sumber data, definisi oprasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskirpsi data, hasil analisis dan pembahasan dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berisikan tentang simpulan-simpulan yang disarikan dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan.